**ANALISIS KINERJA REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA (TTU) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) TAHUN 2015-2017**

**Libertia Andita Merdekawati Kosat**

**Universitas Mercu Buana Yogyakarta**

**ABSTRAK**

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa analisis varians belanja daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dikatakan baik, begitupun analisis pertumbuhan belanja menunjukan pertumbuhan yang positif, sedangkan analisis keserasian belanja daerah masih belum seimbang terlihat dari rata-rata keserasian belanja modal, dan efisiensi belanja masih dalam kategori efisien.

Kata kunci : kinerja APBD, kinerja belanja, kinerja keuangan daerah, varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja, efisiensi belanja.

***ABSTRACT***

*The results of this study indicate that the analysis of regional expenditure variance in North Central Timor Regency can be said to be good, as well as the analysis of expenditure growth shows positive growth, while the analysis of regional expenditure harmony is not yet balanced as seen from the average harmony of capital expenditure, and expenditure efficiency is still in the efficient category .*

*Keywords: APBD performance, expenditure performance, regional financial performance, expenditure variance, expenditure growth, expenditure harmony, expenditure efficiency.*

1. **Pendahuluan**

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk selalu berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintah yang baik *(good government).* Pemerintah yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dalam rangka mewujudkan *good government* maka terjadilah reformasi dalam pengelolaan keuangan. Diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014, kemudian disempurnakan dengan UU No. 9 tahun 2015 serta untuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dikeluarkan juga UU No. 33 tahun 2004 Kedua undang-undang ini erat kaitannya karena secara otomatis dengan adanya peralihan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah harus diikuti dengan penyerahan keuangan yang dipercayakan pemerintah pusat untuk bisa mengolah keuangan di masing-masing daerah. (Dien et al, 2015).

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengenai badan layanan umum. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintahan daerah terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga (Ramli, 2016).

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan komponen penting yang mendapat menggambarkan bagaimana kinerja keuangan yang telah dilaksanakan. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan dalam menghasilkan pendapatan yang merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakannya, karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka tindakan perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja daerah sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan di masa mendatang

Analisis pengukuran belanja dapat diukur menggunakan rasio keuangan. Rasio pertumbuhan belanja adalah untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Maka dari itu, pemerintah daerah harus mengendalikan belanja daerah dengan melakukan efisiensi belanja. Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan oleh rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut tetapi relatif, artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaiknya jika lebih maka mengidentifikasikan telah terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi, 2016).

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Selisih anggaran belanja dikategorikan selisih wajar (*favourable variance*) apabila realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya, dan dikategorikan selisih tidak wajar (*unfavourable variance*) apabila realisasi belanja lebih besar dari anggarannya (Mahmudi, 2016). Rasio keserasian belanja adalah rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi dan belanja modal yang digunakan untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Yoyo, 2017).

1. **Landasan Teori**
2. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Pengertian APBD

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan daerah kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah.

1. **Belanja Daerah**

Pengertian Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

1. **Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah**

Menurut Mahmudi (2016), Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi apakah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif.

1. Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis ini merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja.

Rumus untuk menghitung varians belanja dijelaskan sebagai berikut:

Analisis Varians Belanja

1. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Pertumbuhan belanja adalah kenaikan atau penurunan belanja selama kurun waktu tertentu. Analisis pertumbuhan selain untuk menilai pos belanja dapat pula digunakan untuk menilai pertumbuhan aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan sebagainya. Menurut Mahmudi (2016: 158) rumus untuk menghitung pertumbuhan belanja daerah dijelaskan sebagai berikut:

Pertumbuhan Belanja Tahun t

1. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis keserasian belanja daerah merupakan analisis yang di mana titik fokus analisis berada pada 3 (tiga) fungsi utama anggaran, yaitu sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabibilisasi.

1. Rasio Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja dirumuskan sebagai berikut:
2. Menurut Mahmudi (2016) rumus untuk menghitung belanja operasi terhadap total belanja dijelaskan sebagai berikut:
3. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Menurut Mahmudi (2016), rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Menurut Mahmudi (2016: 164) rumus untuk menghitung efisiensi belanja dijelaskan sebagai berikut:

1. **Metode Penelitian**
2. **Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menganalisis dan menjabarkan angka-angka pada laporan realisasi anggaran belanja.

1. **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedangkan, kriteria penarikan sampel dalam penelitian diambil dari laporan realisasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Daerah Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama 3 (tiga) tahun, dari tahun anggaran 2015-2017.

1. **Jenis data dan sumber data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang termuat dalam laporan realisasi anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2015-2017. Sedangkan, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**Tabel 4.1**

**Varians Belanja pada Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)** **Tahun 2015-2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Realisasi Belanja (Rp)** | **Anggaran Belanja (Rp)** | **Varians Belanja (Rp)** | **Persentase Realisasi** | **Keterangan** |
|
| 2015 | 725.723.455 | 887.835.380 | (162.111.925) | 81.74% | Baik |
| 2016 | 792.260.647 | 964.467.218 | (172.206.571) | 82.14% | Baik |
| 2017 | 944.567.699 | 1.082.067.192 | (137.499.493) | 87.29% | Baik |

Sumber : (Data diolah)

Berdasarkan analisis varians belanja yang telah dilakukan oleh penulis mengenai kinerja realisasi anggaran belanja, maka pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 varians belanja pada Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dikatakan baik dikarenakan nilai realisasi tahun 2015-2017 lebih kecil dari anggaran belanja (Mahmudi 2016).

**Tabel 4.2**

**Pertumbuhan belanja pada Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tahun 2015-2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Realisasi Belanja (Rp)** | **Pertumbuhan Belanja (%)** | **Keterangan** |
| 2014 | 643.791.665 | - | **-** |
| 2015 | 725.723.455 | 12.73% | Positif |
| 2016 | 792.260.647 | 9.17% | Positif |
| 2017 | 944.567.699 | 19.22% | Positif |

Sumber : (Data diolah)

Berdasarkan analisis pertumbuhan belanja yang telah dilakukan oleh penulis, maka pertumbuhan belanja pada Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 pertumbuhan belanja mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan.

**Tabel 4.3**

**Rasio Belanja Operasi pada Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tahun 2015-2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Total Belanja Operasi (Rp)** | **Total Belanja (Rp)** | **Rasio Belanja Operasi** |
| 2015 | 569.098.017 | 725.723.455 | 78.42% |
| 2016 | 610.530.697 | 792.260.647 | 77.06% |
| 2017 | 790.816.373 | 944.567.699 | 83.72% |
| Rata-rata | | | 79.73% |

Sumber : (Data diolah)

Berdasarkan analisis belanja operasi yang telah dilakukan oleh penulis pada Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 belanja operasi terhadap total belanja mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan.

**Tabel 4.4**

**Rasio Belanja Modal pada Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tahun 2015-2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Total Belanja Modal (Rp)** | **Total Belanja (Rp)** | **Rasio Belanja Modal** |
| 2015 | 156.625.428 | 725.723.455 | 21.58% |
| 2016 | 181.729.950 | 792.260.647 | 22.94% |
| 2017 | 153.751.326 | 944.567.699 | 16.28% |
| Rata-rata | | | 20.27% |

Sumber : (Data diolah)

Berdasarkan Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 dan 2016 belanja modal mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2017 belanja modal mengalami penurunan yang signifikan.

**Tabel 4.5**

**Rasio Efisiensi Modal pada Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tahun 2015-2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Realisasi Belanja (Rp)** | **Anggaran Belanja (Rp)** | **Presentase Efisiensi Belanja** | **Keterangan** |
| 2015 | 725.723.455 | 887.835.380 | 81.74% | Efisien |
| 2016 | 792.260.647 | 964.467.218 | 82.14% | Efisien |
| 2017 | 944.567.699 | 1.082.067.192 | 87.29% | Efisien |

Sumber: (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa Efisiensi Belanja Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) telah efisien. Persentase tahun 2015-2017 ini masih di bawah 100%, sehingga dapat dikatakan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) telah mampu melakukan efisiensi belanja pada tahun 2015 sampai dengan 2016 (Mahmudi 2016).

1. **Penutup**
2. **Kesimpulan**
3. Analisis Varians Belanja Daerah

Kinerja realisasi anggaran belanja Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dilihat dari varians belanja, selama tahun 2015-2017 secara umum dapat dikatakan baik. artinya realisasi belanja Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tidak melebihi dari jumlah yang dianggarakan.

1. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Kinerja realisasi anggaran belanja Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dilihat dari pertumbuhan belanja, selama tahun 2015-2017 secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif, karena pemerintah Kebupaten Timor Tengah Utara mampu mempertahankan/meningkatkan target pencapaian belanja dari tahun sebelumnya.

1. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Kinerja realisasi anggaran belanja Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dilihat dari keserasian belanja daerah, secara umum masih belum seimbang terlihat dari rata-rata keserasian belanja modal yang masih lebih 0.27% dari proporsi belanja yang ditentukan.

1. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Kinerja realisasi anggaran belanja dilihat dari efisiensi belanja daerah, secara umum realisasi anggaran belanja Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tidak terdapat angka yang melebihi anggaran belanja, artinya Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) telah melakukan efisiensi belanja hal ini dikarenakan dari tahun 2015-2017 tidak terdapat persentase yang melebihi 100%.

**DAFTAR PUSTAKA**

Assidiqi, Bahrun. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)* Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012, Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Dien, Tinangon dan Walandouw. 2015. “Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung”. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.534-541. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Djayasinga, Marselina. 2014. *Riset Anggaran untuk Rakyat Studi Kasus: APBD Kota Bandar Lampung.* Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume XII No.1.

Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Sektor Publik.* Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.

Ika Maya Sari, Mulyati Akib dan Anggini Shesilia (2018). Analisis Anggaran Belanja Daerah sebagai Alat Pengendalian pada Badan Pengendalian Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis* UHO,3(1). Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018, dari file: D:/Users/Acer/Documents/Kumpulan Jurnal/9761-Article Text-3775-10745-1-PB.pdf

Indra Chirstian Lontaan dan Sonny Pangerapan (2016). Analisis Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014. *Jurnal Emba,* 4 (1) .Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018, dari file: D:/Users/Acer/Documents/Kumpulan Jurnal/9761-Article Text2960-ID-analisis-belanja-anggaran-2012-2.pdf

Kusumadewi, W. N., & llat, V. (2016). Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi,* 4(1).

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN. Yogyakarta.

Nugraeni, N., & Budiantara, M. (2015). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, *12*(1).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.*

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Ramli Faud (2016)*. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Bogor : Ghalia Indonesia.

Ropa, Oktavia M. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal EMBA. Vol.4 No.2: 738-747.

Setiyanto, A., 2018. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Tengah (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif dan Nunung Ayu Sofiati (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah.* Yogyakarta : Andi.